

BAB I

PENDAHULUAN

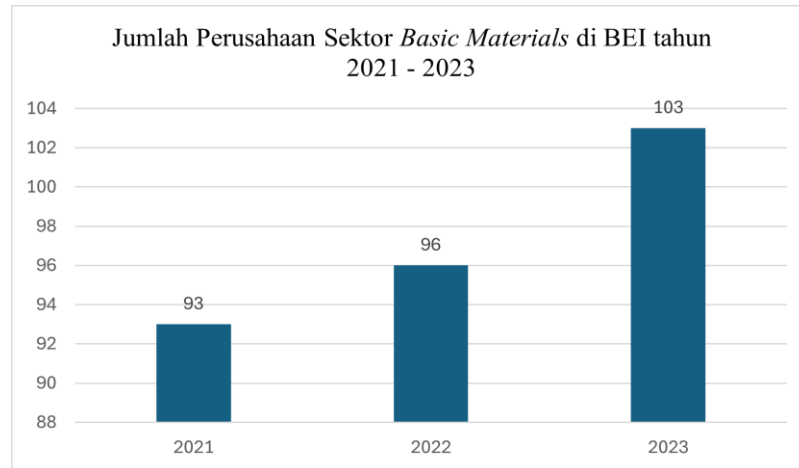
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah badan hukum yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menyediakan sarana yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan perdagangan efek di pasar modal. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang no 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu proses transaksi perdagangan yang dilakukan secara konsisten dan berdasarkan aturan yang jelas. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memiliki klasifikasi industri yang dikenal sebagai *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) sejak tahun 1996 yang mengelompokkan industri ke dalam 9 sektor dan 56 subsektor. Guna memenuhi kebutuhan perkembangan sektor ekonomi baru, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengubah klasifikasi industri JASICA menjadi *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) di tahun 2021 dengan mengelompokkan 12 sektor, 35 subsektor, 69 industri, dan 130 sub industri (Citro, 2021). Sektor perusahaan berdasarkan klasifikasi IDX-IC meliputi sektor energi (*energy*), sektor bahan baku (*basic materials*), sektor perindustrian (*industrials*), sektor barang konsumen non primer (*consumer non-cyclicals*), sektor barang konsumen primer (*consumer cyclicals*), sektor kesehatan (*healthcare*), sektor keuangan (*financials*), sektor properti dan real estate (*properties & real estate*), sektor teknologi (*technology*), sektor infrastruktur (*infrastructures*), sektor transportasi dan logistik (*transportation & logistic*), dan sektor produk investasi tercatat (*listed investment product*).

Indonesia merupakan negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) *Economic Outlook*, ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh sebesar 5% pada tahun 2023 dan 5,1% pada tahun 2024. Potensi pertumbuhan ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan yang ada di Indonesia terutama sektor *basic material* untuk

mengembangkan bisnisnya dan menghasilkan pendapatan serta laba yang lebih tinggi (Beansprout, 2024). Selain itu, diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak sawit, batu bara, karet, mineral, gas alam, dan logam. Indonesia merupakan produsen minyak sawit dan nikel terbesar di dunia dan juga mencapai salah satu eksportir batu bara khususnya batu bara termal. Faktor ini menjadi alasan meningkatnya permintaan komoditas global sehingga menghadirkan peluang bagi perusahaan terutama sektor *basic material* untuk memanfaatkan sumber daya alam guna memperluas jangkauan pasar.

Sektor *basic materials* merupakan salah satu sektor yang masuk dalam klasifikasi IDX-IC. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena memiliki bisnis menjual barang dan menyediakan jasa kepada industri lain untuk memproduksi barang akhir. Sektor *basic materials* menjadi sektor terbesar kedua dengan nilai transaksi 13% dalam kapitalisasi pasar atau *market cap* Indonesia yang dicatat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2023 (Puspadini, 2023). Dalam sektor *basic materials*, perusahaan yang menjual produk dan jasa mencakup perusahaan yang memproduksi barang kimia dasar, material konstruksi penambangan dan distribusi barang dasar konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan (aluminium, tembaga, emas, baja dan besi, logam dan mineral non-logam), barang kayu serta kertas dan produk hutan lainnya. Berikut data jumlah perusahaan sektor *basic materials* di BEI tahun 2021 – 2023.



Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Sektor Basic Materials di BEI tahun 2021 – 2023

Sumber: www.idx.co.id (2023)

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 - 2023. Jumlah sektor *basic materials* pada tahun 2021 sebanyak 93 perusahaan dan mengalami peningkatan di tahun selanjutnya menjadi 96 perusahaan. Perusahaan sektor *basic materials* mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya hingga di tahun 2023 sebanyak 103 perusahaan. Terjadinya peningkatan jumlah perusahaan sektor *basic materials* menunjukkan bahwa sektor *basic materials* merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya dalam pembangunan infrastruktur (Rohim, 2024). Dengan adanya pembangunan infrastruktur di Indonesia yang akan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, maka akan berdampak positif pada pertumbuhan sektor *basic materials* karena sektor *basic materials* merupakan salah satu industri yang menjual dan menyediakan barang serta jasa. Disisi lain, sektor ini juga memiliki tantangan yang harus dihadapi seperti pencemaran lingkungan, deforestasi, dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Subarudi & J, 2024). Oleh karena itu, peneliti memilih perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengungkapan

corporate social responsibility telah sesuai peraturan yang berlaku dan mengungkapkan pelaporan kegiatan *corporate social responsibility* perusahaan ke dalam suatu laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*).

1.2 Latar Belakang Penelitian

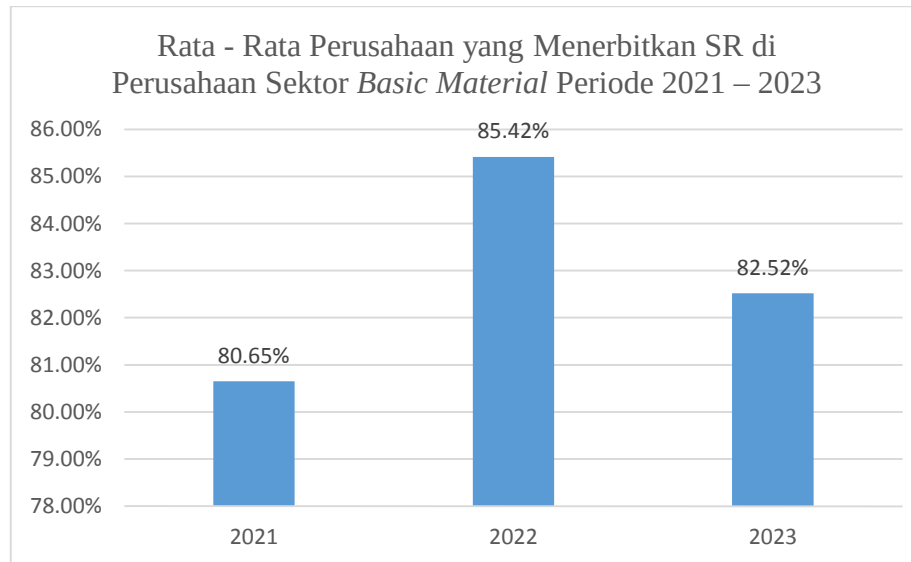
Saat ini, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada umumnya mendapatkan tuntutan yang lebih tinggi dari investor untuk melakukan pengungkapan informasi secara luas. Kebutuhan akan informasi ini tidak dapat hanya dipenuhi dengan pengungkapan wajib dari segi keuangan dan fundamental saja, tetapi perusahaan juga perlu mengungkapkan informasi lebih banyak dengan cara yang bertanggung jawab sosial. Oleh karena itu, laporan yang dihasilkan perusahaan tidak hanya mencantumkan kondisi keuangan perusahaan (*single bottom line*), namun juga mengungkapkan kondisi keuangan, lingkungan, dan sosial (*triple bottom line*) (Siregar I et al., 2022).

Corporate social responsibility merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap pemangku kepentingannya dalam bidang sosial, lingkungan, dan pendidikan (Cahyaningsih & Dela Mustapa, 2022). Melalui CSR, perusahaan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan menyediakan fasilitas publik (Samosir & Panjaitan D, 2022). Menurut (Alfani & Muslih, 2022) aktivitas perusahaan terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, dapat memanfaatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai strategi untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat guna mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainability*). Johnson & Johnson (2006) dalam (Priyatama et al., 2023) dan Revika Septianingsih & Muslih (2019) menyatakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola bisnisnya guna memberikan dampak positif pada masyarakat.

Pengungkapan *corporate social responsibility* didasarkan pada beberapa prinsip utama; (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) keterlibatan pemangku kepentingan, (4) keberlanjutan. Dalam Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud, maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan terkait pengungkapan *corporate social responsibility* tercatat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 pasal 3 menyatakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Adanya peraturan tersebut diharapkan agar Perseroan mematuhi peraturan guna meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan publik serta pemangku kepentingan.

Perusahaan mengungkapkan *corporate social responsibility* (CSR) dengan *sustainability report* (SR) yang diterbitkan setiap tahun. Pelaporan keberlanjutan sebagaimana didefinisikan oleh pedoman Global Reporting Initiative (GRI) merupakan praktik pelaporan yang jujur tentang dampak ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan (Rahmat, 2022). Pelaporan ini harus mencakup kontribusi baik dan buruk terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan menyediakan informasi dan aspek-aspek yang tidak ditemukan dalam laporan keuangan, sehingga beberapa perusahaan Indonesia menjadi semakin sadar akan pentingnya nilai pelaporan keberlanjutan dengan laporan keuangan (Jawas & Sulfitri, 2022). Bhatia & Tuli (2017) dalam penelitian (Hikmah & Anisykurlillah, 2023) menyatakan terdapat beberapa manfaat diterbitkannya laporan keberlanjutan bagi pihak eksternal dan internal antara lain: (1) meningkatkan transparansi perusahaan serta hubungan dengan pemangku kepentingan, (2) membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka

panjang, (3) membantu menunjukkan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan dengan isu sosial dan lingkungan, dan (4) mengelola reputasi perusahaan.



Gambar 1. 2 Rata - Rata Perusahaan yang menerbitkan SR di Perusahaan Sektor Basic Material Periode 2021 – 2023

Sumber: data diolah oleh peneliti (2025)

Gambar 1.2 menunjukkan rata - rata perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* khususnya Perseroan dalam sektor *basic material* periode 2021 - 2023. *Sustainability report* yang diterbitkan perseroan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total perusahaan sektor basic material yang terdaftar di BEI sebanyak 96 perusahaan, terdapat 82 perusahaan atau 85,42% yang menerbitkan *sustainability report*. Tahun tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada 93 perusahaan dengan 75 perusahaan atau 80,65% yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sementara itu, pada tahun 2023 perusahaan sektor basic material mengalami tingkat penurunan penerbitan *sustainability report* menjadi 82,52% atau 85 perusahaan dari total 103 perusahaan yang terdaftar di BEI. Terjadinya fluktuasi terkait *sustainability report* yang diterbitkan oleh perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan

terkait laporan keberlanjutan, tidak ada ketentuan dari perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan, serta kinerja lingkungan atau sosial yang buruk bisa menjadi penyebab perusahaan tidak menerbitkan laporan keberlanjutan.

Perusahaan yang melaksanakan *corporate social responsibility* berarti menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya untuk memitigasi dampak negatif dari operasi yang dijalankan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun yang terjadi pada perusahaan sektor *basic material* yaitu PT Vale Indonesia tidak sejalan dengan seharusnya. Kegiatan operasional perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel ini mengakibatkan dampak sosial dan lingkungan terhadap Dusun Kuari, Desa Asuli, Kecamatan Towut. Masyarakat Desa Asuli mengajukan protes kepada PT Vale Indonesia dengan menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak menepati janjinya untuk membangun kembali perekonomian masyarakat Asuli dan petani di desa sekitar yang dirugikan oleh penggusuran lahan dan kebun merica (Amien, 2023). Selain itu deforestasi hutan yang mengakibatkan terjadinya longsor tahun 2022 area Ferrari Hiels dan pencemaran sumber air masyarakat akibat lumpur yang disebabkan aktivitas tambang nikel juga menjadi keresahan warga sekitar (Rachman, 2024).

Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional PT Vale Indonesia tidak mencerminkan pelaksanaan *corporate social responsibility* yang sebenarnya. Dalam standar GRI 411 tentang Hak Masyarakat Adat 2016 dijelaskan bahwa organisasi diharuskan melaporkan informasi tentang dampak mereka terkait masyarakat adat, dan cara mengelola dampak-dampak tersebut. Namun faktanya, terdapat gap antara pelaporan resmi dan realitas di lapangan. Hal ini diperkuat dengan pengungkapan *corporate social responsibility* dalam *sustainability report* perusahaan tahun 2023. Pada laporan *sustainability report* tahun 2023, level pengungkapan *corporate social responsibility* mencapai skor sempurna atau 100%, hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jika nilai pengungkapan *corporate social responsibility* sempurna, maka tidak ada dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Perusahaan

mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan di daerah tersebut yang telah kehilangan keindahan dan kelestariannya. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam menerapkan CSR untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan terjadi, misalnya dengan adanya edukasi terkait penanggulangan limbah, mendukung aspek kesehatan dan keselamatan karyawan, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, menyediakan dana pendidikan, melakukan penghijauan di wilayah sekitar yang terdampak, serta menyelenggarakan layanan kesehatan gratis dan lainnya (Octarina et al., 2018).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*. Dalam penelitian ini, peneliti memilih ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit sebagai variabel independen yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* adalah ukuran Dewan Komisaris (*board size*). Dewan komisaris merupakan sekelompok individu yang berada pada posisi kedua setelah RUPS dalam perusahaan yang dipilih oleh pemegang saham. Menurut (Afifah & Immanuela, 2021), mengawasi kinerja direksi dan memberi nasihat jika terjadi suatu kesalahan dalam membuat keputusan merupakan salah satu tanggung jawab dewan komisaris. Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengawasan manajemen dalam perusahaan. Dengan adanya jumlah dewan komisaris lebih besar, maka perusahaan dapat memiliki lebih banyak pengawasan atas manajemen dan akan banyak perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan sehingga diperlukan adanya kehati-hatian dalam melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Zahroh H et al., 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proksi jumlah dewan komisaris dalam laporan tahunan perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021 - 2023. Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Yanti N et al., 2021) menyatakan adanya pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* karena semakin besar jumlah anggota

dewan komisaris dalam perusahaan maka akan semakin mudah dan efektif dalam mengendalikan CEO serta memonitoring aktivitas atau kegiatan perusahaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Santo & Rahayuningsih, 2022) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* karena dewan komisaris berperan sebagai wakil dari *shareholders* dimana akan membuat kebijakan lebih menguntungkan dengan menggunakan laba dibandingkan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian - penelitian terdahulu ini menunjukkan adanya inkonsistensi hubungan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* adalah ukuran Komite Audit (*audit committee size*). Komite audit merupakan sekelompok individu yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan internal perusahaan. Salah satu komponen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yaitu adanya komite audit yang memiliki peran memastikan transparansi dan legitimasi semua operasi bisnis perusahaan serta dapat mempengaruhi pilihan manajemen dalam meningkatkan CSR (Pudjianti & Ghazali, 2021). Komite audit yang kuat akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, khususnya berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Tiarani et al., 2023). Selain itu, kinerja sosial akan lebih diawasi ketika terdapat lebih banyak komite audit yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya pengungkapan CSR (Thasya et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian oleh (Mohammadi et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* karena komite audit yang memiliki anggota lebih banyak akan terdiri dari individu – individu dengan berbagai keahlian dan pandangan yang lebih efektif dalam proses pengawasan untuk mengatasi masalah pelaporan keuangan dan non – keuangan seperti pengungkapan CSR. Sementara itu hasil penelitian oleh (Rivandi & Putra, 2021) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* karena perusahaan membentuk komite audit masih dengan tujuan sebagai bentuk peraturan dan melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang berkaitan dengan review pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian - penelitian terdahulu ini menunjukkan inkonsistensi hubungan antara ukuran komite audit dan variabel dependen.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* adalah frekuensi rapat Komite Audit (*audit committee number of meeting*). Untuk meningkatkan pemantauan pengawasan pelaporan keuangan dan praktik *corporate social responsibility*, rapat komite audit sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Peraturan OJK Nomor 55/ POJK.04/2015 pasal 13 tentang penyelenggaraan rapat menyatakan Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pudjianti & Ghozali, 2021) menyatakan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* karena semakin banyak rapat yang dilakukan komite audit maka akan memperkuat fungsinya dan pengungkapan CSR semakin luas. Sementara itu, penelitian oleh (Desoky, 2024) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* karena tingginya frekuensi rapat komite audit tidak mencerminkan keterlibatan yang efektif dalam memastikan kebijakan perusahaan di bidang lingkungan dan sosial selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan maupun kontrak sosial. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan rapat komite audit belum berjalan secara maksimal dalam melaksanakan fungsi CSR perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian - penelitian terdahulu ini menunjukkan adanya inkonsistensi hubungan antara frekuensi rapat komite audit dan pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor *basic material* serta terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu antara variabel independen

terhadap variabel dependen, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi pada Perusahaan Sektor *Basic Material* yang Terdaftar di BEI Periode 2021 - 2023)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan keberlanjutan merupakan suatu bentuk transparansi perusahaan kepada publik dan pemangku kepentingan, serta masyarakat lokal yang terkena dampak langsung oleh aktivitas operasional perusahaan. Laporan keberlanjutan ini penting untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara transparan dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Pedoman dalam penyusunan laporan keberlanjutan menggunakan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) dan POJK. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak konsisten dan belum optimal dalam menerbitkan laporan keberlanjutan serta isi laporan yang disampaikan tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian laporan yang diterbitkan dengan aktivitas yang terjadi dilapangan, sehingga timbul pertanyaan mengenai konsistensi dan transparansi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Salah satu aspek yang diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* adalah mekanisme tata kelola perusahaan. Jumlah anggota dewan komisaris mencerminkan kapasitas pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategis, termasuk dalam laporan keberlanjutan. Komite audit serta intensitas rapat mencerminkan perusahaan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaporan, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Mengacu pada latar belakang yang dikemukakan sebelumnya serta perumusan masalah, maka dihasilkan beberapa pertanyaan dari penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
4. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial ukuran komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian yang dapat menunjukkan suatu masalah layak diteliti. Hasil penelitian ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat membantu memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada bidang akademik, khususnya dalam studi akuntansi serta menambah wawasan terkait pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi penelitian selanjutnya serta memberikan wawasan yang lebih kaya terkait bagaimana variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian yang mengungkapkan pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, agar dapat membantu manajer perusahaan dalam meningkatkan serta memperbaiki strategi dalam praktik *corporate social responsibility*.

2. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan kepada pemangku kepentingan dalam menilai perusahaan memiliki komitmen serius terhadap *corporate social responsibility*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Gambaran penulisan tugas akhir terkait pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit terhadap *corporate social responsibility* disusun melalui penerapan sistematika penulisan. Sistematika penulisan tugas akhir yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum sektor *basic material*, latar belakang penelitian terkait pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori legitimasi sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu terkait variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai referensi penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian yang berhubungan dengan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam penelitian, variabel independen dan variabel dependen serta populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian secara deskriptif terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel independen dan analisis atau pembahasan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat digunakan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan